

# Menyoal Kebijakan Pemkab Batubara

Oleh Erwan Efendi

Ada kesan seperti telah terjadi semacam skenario bahwa kehidupan komunitas masyarakat nelayan tidak boleh disejahterakan.

Hakikat dan pemekaran suatu daerah adalah keinginan meningkatkan kesejahteraan berbagai kehidupan yang selama ini terasa pahit. Namun, secara empiris hingga akan berakhirnya periode bupati definitif sejak dimulainya, belum tercermin kebijakan signifikan Pemkab Batubara dalam berbagai hal, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Walaupun ada, semata-mata merupakan kepentingan politik.

Kebijakan Pemkab Batubara itulah merupakan salah satu penyebab semakin terjepitnya masyarakat *wahil khusus* nelayan. Bahkan akhir-akhir ini ada kesan menciptakan konflik antarsesama nelayan—karena tidak bersikap tegas dalam menegakkan peraturan tentang pengaturan zona tangkap. Di samping memberi peluang terjadinya mobilisasi kehadiran alat tangkap pukat grandong asal daerah lain di perairan Batubara. Justru, konflik antar nelayan tak akan pernah berakhir sepanjang kebijakan tak memihak kepada kebenaran.

Memang, kita tidak menafikan bahwa Pemkab Batubara sudah berbuat untuk melindungi nelayan skala kecil dari gangguan pukat grandong/ganding—dengan membuat dan menanam terumbu karang di kawasan penangkapan nelayan skala kecil. Tujuan Pemkab Batubara ini cukup baik, karena dengan tindakan itu pukat grandong tidak berani lagi beroperasi di wilayah itu—takut alat tangkap mereka hancur jika tersangkut. Tetapi, apa yang terjadi, pemasangan ranjau laut yang dibuat dari batu beton setinggi beberapa meter dari dasar laut itu menjadi persoalan baru bagi nelayan skala kecil.

Jika semula sasaran pemasangan ranjau itu sebagai upaya menghalau konvoi pukat grandong, tetapi akhirnya menjadi tidak cerdas, karena menyoal nelayan skala kecil. Kawasan yang selama ini mereka kuasai sebagai areal mencari nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga, kini tak lagi menjadi sahabat, tetapi mendatangkan bala bagi alat tangkap mereka.

Kebijakan Pemkab Batubara itu menjadi persoalan baru bagi nelayan skala kecil dan berdampak pada pendapatan serta kesejahteraan. Jika

para nelayan skala kecil memaksakan diri harus menabur jaring di kawasan yang sudah ditabur ranjau, mereka harus siap menerima resiko, karena ranjau tersebut setiap saat siap menghabis alat tangkap mereka tanpa pilih kasih.

## Politik Pencitraan

Kebijakan lain yang dilakukan Pemkab Batubara yakni membeli kapal operasi "Singa Laut" untuk pengawasan kehadiran pukat grandong dan sejenisnya. Namun, kapal itu terlihat lebih lama bertambat di tangkahan daripada beroperasi di laut, sehingga pukat grandong tetap beroperasi secara leluasa. Apalagi jika diteliti, bobot mesin kapal "Singa Laut" jauh lebih rendah dibanding yang dimiliki pukat grandong.

Dari berbagai kebijakan tersebut jelas kelihatan hanya sekedar mencari popularitas bagi menunjukan kepada daerah lain dan pejabat pusat bahwa Pemkab telah berbuat untuk kepentingan nelayan. Keberadaan nelayan selalu menjadi komoditi politik pencitraan. Bahkan nelayan selalu menjadi alat kepentingan politik ketika masa pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) dan calon kepala daerah. Berbagai macam janji-janji manis muncul dari mulut Caleg dan calon kepala daerah. Tetapi, kenyataan di lapangan kehidupan, nelayan tidak pernah berubah. Sepanjang tahun keadaan mereka lebih sering diselimuti kesulitan dari pada kesejahteraan.

Ada kesan seperti telah terjadi semacam skenario bahwa kehidupan komunitas masyarakat nelayan tidak boleh disejahterakan. Karena itu, berbagai konsep tentang pembangunan nelayan cukup sebatas wacana tapi tidak boleh sampai pada tindakan, walaupun ada hanya sekadarnya. Dengan begitu, populasi nelayan yang memiliki pemilih potensial signifikan ini terus menjadi komunitas yang memiliki ketergantungan. Kelemahan itu merupakan peluang yang dimanfaatkan para pemangku kepentingan dengan menabur janji-janji manis, sehingga nelayan selalu terjebak dalam menentukan sikap.

Justru, wadah tempat berkumpulnya nelayan seperti HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) harus



mampu memberikan pencerdasan politik terhadap nelayan. Nelayan sebagai pemilih potensial harus mendapatkan pemahaman politik yang baik dan benar, sehingga mereka memahami dengan benar hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan begitu, nelayan tidak lagi seperti membeli kucing dalam karung ketika menentukan sikap politiknya pada pemilihan Caleg dan kepala daerah yang sudah di depan mata.

Selama ini ada kesan HNSI tidak lagi mampu ber suara sebagai penyalur aspirasi nelayan kalau pun berbicara cenderung menjadi corong atau memihak kepada kepentingan Pemkab. Tidak ada kritik atau sosial kontrol cerdas yang mampu dilakukan HNSI terhadap berbagai kebijakan Pemkab. Padahal, cukup banyak kebijakan Pemkab yang bisa dikritisi dalam upaya membantu kepentingan anggota. Para elit HNSI terkesan hanya berada pada posisi penonton yang seharusnya menjadi pemain handalan dalam mengatur strategi pembangunan nelayan dan menyoal berbagai keluhan nelayan.

## Penutup

Ke depan, semua pihak tidak hanya HNSI harus ikut membangun keberadaan nelayan yang memang dari periode ke periode selalu menjadi komoditas politik. Potensi nelayan harus diberdayakan secara maksimal, sehingga menjadi satu kekuatan dalam menentukan arah pembangunan Batubara ke depan. Semoga.

Penulis adalah Wartawan Waspada, Anggota ICBA (Ikatan Cendekiawan Batubara)

Kamis, 4/4 - 2013